

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.I Latar Belakang**

Perpecahan internal partai pada dasarnya adalah pertikaian antara kelompok yang terhimpun dalam satu wada organisasi minimal dua elemen partai dalam rangka untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pertikaian ini sering mengara pada suatu kepentingan masing-masing kelompok untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar, pada dasarnya, bahwa kekuasaan yang semakin besar, kelompok elit partai lebih leluasa untuk melaksanakan semua hal baik kepentingan partai, kepentingan kelompok, dan kepentingan individu.

Bahkan dinamika ini memperlihatkan bahwa sebua kepentingan yang dilaksanakan tidak difokuskan yang harus diprioritaskan dan yang belum dilaksanakan bahkan sering kali kepentingan berkuasa berada pada sebua kepentingan diri sendiri dan elite lain yang terhimpun dalam wada organisasi, sehingga pertikaian ini tidak bias untuk

dihindari dan mengakibatkan konflik daalam tubuh partai politik terus berjalan sebab masih kental dengan egoisme sesama elite. Pada hal suatu organisasi baik itu partai politik maupun himpunan yang namanya perkumpulan yang pastinya memiliki konstitusi sebgaai bijakan untuk menjalankan organisasi partai agar supaya lebih demokratis di internal partai, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik memaikan peran yang sangat strategis sebab aturan partai ini bukan saja sebua aturan yang lebih spesifik berbicara tentang tujuan dasar suatu.

Partai,merupakan media utama pelembagaan demokrasi internal partai politik, menurut Ali Margiono ada dua isu sentral dalam manajemen partai dimana demokrasi seharusnya menjadi prinsip dasar di dalamnya. Pertama lebih menekankan dalam proses pengambilan keputusan yang baik dan tidak merugikan kelompok yang lain, yang kedua resolusi konflik dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam partai politik yang pastinya dalam proses penyelesaian konflik sesama elite harus bersifat demokratis dan tidak merugikan kelompok yang lain dan tidak berdampak pada kelembagaan partai, maka yang pastinya

disini lebih menekankan pada aspek regulasi dan tempat yang strategis untuk mengasa sebua langka dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam internal partai politik.( Jainuri:2008:3).

Partai politi/kelompok organisasi apapun bentuknya harus memiliki sebua regulasi atau sistem internal yang demokratis sebab tujuan membangun partai politik yaitu untuk memperoleh kekuasaan yang demokratis, agar supaya lebih mengara pada satu sistem politik yang lebih demokratis, membangun sebua partai yang demokratis bagain dari bentuk karakteristik yang harus dimiliki agar dalam ruang persaingan bisa dimiliki oleh elite yang terhimpun dalam partai politik dengan tujuan memperoleh kekuasaan.

Perhelatan partai politik di era reformasi yang kita lihat sekarang ini masi terjadi benturan sesama elit partai, benturan ini tidak terlepas dari sebua kepentingan elit secara kelompok mapun secara individu, Pada tahun 2014 Partai Golongan Karya (Golkar) dimassa kepemimpinan Abruzal Bakri kembalih diguyur konflik ditingkat DPP, konflik ini berlangsung dalam agenda musawara

nasional (Munas 2014). Golkar pada proses suksesi Pemilu Presiden 2014 secara internal tidak memilih/memutuskan calon Presiden dari partai yang berlambang pohon beringin ini, dinamika ini bagian dari titik awal terjadinya benturan atau berbeda pendapat sehingga mengara pada konflik sesama elite dalam tubuh Partai Golkar ditingkat pusat. Konflik elite Partai Golkar yang berjalan selama 1 tahun lebih terakhir tampaknya mulai kehilangan kepercayaan rakyat terhadap partai yang bersimbol pohon beringin ini. Bergulirnya era reformasi, suksesi kekuasaan politik Partai Golkar sebetulnya tidak selalu baik. Benturan kepentingan elite partai senantiasa mewarnai perpindahan penguasaan elite Partai Golkar.

Sementara perpecahan yang terjadi di DPP, berpengaruh terhadap perselisihan elit ditingkat DPD I Maluku Utara, Golkar Maluku Utara kubu Aburizal Bakrie memecat sejumlah kader partai Kota Ternate, karena beralih ke kepengurusan kubu DPP Golkar Agung Laksono. Sehingga fokus utama penulis dalam penelitian ini adalah melihat dinamika perpecahan elit dan

soliditas dalam internal Partai Golkar pada pemenangan Walikota dan Wakil Walikota Ternate periode 2015-2020.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Soliditas Dan Perpecahan Elit Parti Golkar Kota Ternate Pada Pemenangan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate 2015?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perpecahan Dan Soliditas Elite dalam tubuh DPD II Partai Golkar Kota Ternate?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka secara umum penulis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis tentang Perpecahan dan Soliditas Partai Golkar pada Pemenangan Pilkada Serentak 2015 di Kota Ternate. Adapun maksud dan tujuan secara khusus penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menggambarkan Perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar Pada Pemenangan Pilkada serentak di Kota Ternate pada tahun 2015.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar Kota Ternate.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1 Manfaat Akademis.

1. Untuk memberikan masukan pada para akademisi dalam menambah kontribusi terhadap pengembangan literatur kajian Partai Politik terutama dalam aspek pengembangan kapasitas untuk memahami dan mengetahui tentang proses perpecahan dan soliditas partai politik dan dapat bisa digunakan untuk peneliti selanjutnya.
2. Memperkaya Pemahaman kajian-kajian ilmu politik khususnya partai politik dari perspektif politik yang masih minim minat untuk mengkaji dinamika perpecahan dan soliditas partai politik dalam kemenangan pemilihan kepala daerah.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis.

1. Bagi pengurus DPD II Partai Golkar Kota Ternate dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam melaksanakan roda organisasi, khususnya dalam peningkatan kinerja dan soliditas yang berkaitan dengan kepentingan organisasi partai politik bisa di jadikan sebagai referensi dalam proses penyelesaian masalah dalam internal partai sehingga tidak melahirkan proses perpecahan yang berdampak kepada soliditas partai.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau bukti empiris mengenai perpecahan dan soliditas partai politik pada pemenangan pemilihan kepala daerah.